



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 138/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **sembilan belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **19:11** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Ir. Syahril Japarin, dkk. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2024 memberi kuasa kepada MAQDIR ISMAIL, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Kamis** tanggal **tiga** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **08:31** WIB.

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 138/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Ir. Syahril Japarin, dkk.
Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
No APPP : 138/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Surat Kuasa	1	
7	Berkas Fisik Permohonan bertanggal 19 September 2024	2 rangkap	1 asli, 1 copy.
8	Daftar Alat Bukti bertanggal 19 September 2024.	2 rangkap	1 asli, 1 copy.
9	Alat Bukti	2 rangkap	1 asli nazegele, 1 copy. P-1 s.d. P-14.
10	Surat Kuasa Pemohon bertanggal 22 Juli 2024, 24 Juli 2024, dan 26 Juli 2024.	5 rangkap	1 asli, 4 copies.
11	KTP Pemohon dan Kuasa Hukum	1 rangkap	1 copy.
12	KTA dan BAS Kuasa Hukum	3 rangkap	3 copies.
13	Flashdrive	1 unit	isi: Permohonan (word dan PDF), Surat Kuasa (PDF), Identitas Pemohon dan Kuasa Hukum (JPG dan PDF), DAB (word dan PDF), Alat Bukti (PDF).

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.